

---

# DAMPAK HILIRISASI NIKEL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MOROWALI

Fiola Novidia Aprilianti, Yuniarti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## Abstrak

Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mengalami lonjakan pembangunan ekonomi semenjak beroperasinya kawasan industri nikel, yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kawasan ini adalah bagian dari implementasi kebijakan hilirisasi melalui Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait Mineral dan Batu Bara yang mengharuskan pemilik izin tambang untuk membangun fasilitas pemurnian. Adanya kawasan ini telah memberikan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan pendapatan masyarakat yang ada disekitar kawasan IMIP. Namun, pembangunan ekonomi ini tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar industri, terutama Desa Fatufia dan Desa Labota yang menjadi lokasi berdirinya IMIP. Hal ini dikarenakan kebijakan hilirisasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hilirisasi nikel terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali, khususnya Desa Fatufia dan Desa Labota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisa data kualitatif, serta sumber data primer dari studi pustaka dan data sekunder dari dokumen resmi milik pemerintah.

**Kata Kunci:** Kabupaten Morowali, Hilirisasi Nikel, Kerusakan Lingkungan, Kesejahteraan Masyarakat

## Abstract

*Morowali Regency, Central Sulawesi has experienced a surge in economic development since the operation of the nickel industrial zone, namely the Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). This area is part of the implementation of the downstream policy through Law No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, which requires mining license holders to build refining facilities. The existence of this area has led to an increase in Gross Regional Domestic Product (GRDP) as well as increased income for the surrounding communities near IMIP. However, this economic development has not been accompanied by an improvement in the welfare of the local community, especially in Fatufia Village and Labota Village, which are the locations of IMIP. This is due to the downstream policy that has caused environmental damage affecting people's welfare. This study aims to analyze the impact of nickel downstreaming on the welfare of the community in Morowali Regency, specifically in Fatufia Village and Labota Village. This research also uses a descriptive research type with qualitative data analysis techniques, as well as secondary data sources obtained through literature study and primary data through government documents.*

**Keywords:** Morowali Regency, Nickel Downstreaming, Enviromental Damage, Community Welfare

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil mineral yang mana salah satunya adalah nikel. Nikel adalah mineral tambang yang banyak digunakan dalam berbagai sektor produksi. Mineral ini memiliki beberapa keunggulan seperti tahan korosi, tahan suhu tinggi serta tahan lama. Hasil produksi utama dari komoditi ini adalah baja anti-karat yang digunakan dalam industri kesehatan, konstruksi, dan otomotif.

---

Dalam perkembangannya, selain baja anti-karat, nikel juga digunakan untuk memproduksi baterai litium untuk kendaraan listrik. Walaupun produk utama dari nikel adalah baja anti-karat, namun penggunaannya terus berkembang dengan memproduksi baterai litium-ion untuk kendaraan listrik. Namun, dengan nilai nikel yang sangat strategis ini, Indonesia masih belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dikarenakan Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi yang sangat rendah.

Untuk meningkatkan potensi nikel ini, pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan hilirisasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengembangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pemasukan negara melalui industri pengolahan pertambangan dengan tujuan utama dengan peralihan produksi dari hulu ke hilir (Syahrir, 2017). Terbitnya peraturan ini mewajibkan para perusahaan yang memegang Izin Usaha Tambang (IUP) dan pemilik Kontrak Karya (KK) untuk mendirikan pabrik pengolahan/smelter dalam negeri.

Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan hilirisasi ini adalah pembangunan kawasan industri pengolahan nikel yang diberi nama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali atau lebih tepatnya di Desa Fatufia dan Desa Labota. Pembangunan kawasan industri ini merupakan hasil kerja sama dari Indonesia dan Tiongkok pada forum *Business Luncheon* pada tahun 2013 (Oktarinda, 2013).

Berdirinya IMIP telah membawa dampak bagi perekonomian daerah yang terlihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Morowali dari tahun 2016 hingga 2023 yang secara konsisten mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan pendapatan masyarakatnya yang juga mengalami peningkatan.

Akan tetapi, peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita ini tidak dapat memastikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, program hilirisasi telah menimbulkan dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, hilirisasi menimbulkan dampak positif melalui peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Namun, di sisi lain, program ini ditengarai telah menyebabkan dampak negatif bagi kondisi lingkungan yang nantinya akan berpengaruh pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, jurnal ini akan meneliti tentang bagaimana dampak hilirisasi nikel terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali.

---

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Deskriptif sendiri ialah jenis penelitian yang digunakan untuk variabel mandiri tanpa mencari hubungan serta membandingkannya dengan sampel variabel yang lain (Sugiyono, 2013). Penelitian ini kemudian berfokus pada dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Fatufia dan Desa Labota yang menjadi lokasi berdirinya kawasan industri IMIP.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang didapat melalui jurnal, buku dan informasi yang relevan dari internet, serta sumber data primer yang berasal dari dokumen resmi milik pemerintah. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini bersumber dari kajian pustaka atau *library research*. Sedangkan untuk teknik analisa data, penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Sugiyono (2013) mengatakan jika penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

## LANDASAN TEORI

### TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam istilah ekonomi murni, pembangunan secara tradisional berarti meningkatkan pendapatan per kapita seseorang secara berkelanjutan yang tujuannya agar negara dapat menghasilkan lebih banyak output yang lebih banyak dan cepat dari pertumbuhan penduduknya (Todaro dan Smith, 2014).

Untuk mengukur seberapa baik keadaan ekonomi dalam pengertian tersebut, maka harus dilihat melalui Pendapatan Nasional Bruto (PDB) "rill" yang menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang bisa diakses oleh rata-rata warga negara untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi (Todaro dan Smith, 2014) Oleh karena itu, strategi pembangunan seperti ini berfokus pada industrialisasi yang berkaitan dengan biaya, efisiensi, manfaat dan hasil ekonomi lainnya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.

Namun, Todaro dan Smith (2014) berpandangan jika pembangunan ekonomi tidak semata-mata hanya diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau pendapatan per kapita, tetapi juga harus dilihat sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga.

---

Todaro dan Smith (2014) menjelaskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi diperlukan oleh 3 faktor yaitu:

### **1) Peran Lembaga Pemerintah**

Lembaga pemerintah memiliki peran utama untuk mengatur “aturan main” dalam kegiatan ekonomi (Todaro dan Smith, 2014). Berdasarkan hal ini maka lembaga pemerintah menetapkan aturan berdasarkan hukum dan undang-undang seperti :

- a) Menetapkan dan menegakkan hak kepemilikan serta kontrak
- b) Mencegah tindakan yang memaksa, curang atau tidak adil
- c) Mengatasi masalah koordinasi antar pelaku ekonomi
- d) Membatasi kekuasaan kelompok elit
- e) Menyelesaikan konflik secara adil

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Todaro dan Smith (2014) mengatakan jika lembaga pemerintah bertugas untuk menetapkan peraturan dan kebijakan dalam kegiatan ekonomi serta mengakomodasi semua kepentingan secara adil tanpa merugikan pihak mana pun. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi risiko konflik yang menghambat perekonomian.

### **2) Pengaruh Norma Sosial**

Norma sosial sendiri ialah aturan tidak tertulis yang dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat sehingga membentuk pola perilaku. Todaro dan Smith (2014) menjelaskan jika norma sosial dan perilaku dapat menciptakan atau menghambat perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.

Peran norma sosial juga mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui interaksi terhadap kerja sama, kejujuran, gotong royong dan saling percaya untuk memperkuat produktivitas ekonomi. Todaro dan Smith (2014) mengungkapkan jika hubungan korporatif ini menjadi norma bagi masyarakat akan membuat lebih banyak orang yang juga akan mengadopsi perilaku korporatif. Dalam masyarakat yang aktif secara sosial, norma-norma ini dapat membantu menghindari konflik dan mendorong efektivitas ekonomi.

### **3) Kesehatan, Pendidikan Sebagai Modal Sosial**

Todaro dan Smith (2014) menjelaskan jika kesehatan dan pendidikan tidak hanya menjadi tujuan dari pembangunan, tetapi juga menjadi bagian syarat utama bagi perekonomian. Kedua faktor ini akan membentuk apa yang kemudian disebut

dengan *human capital* atau modal manusia yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Kesehatan dan pendidikan juga saling berhubungan satu sama lain di mana keberhasilan pendidikan ditentukan pada kesehatan yang memadai, begitu juga sebaliknya, sehingga kedua faktor ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan perekonomiannya. Maka dari itu, investasi dalam kesehatan dan pendidikan menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi.

Dalam prosesnya, indikator kesejahteraan masyarakat ini akan sangat bergantung pada kualitas lingkungannya. Todaro dan Smith (2014) menjelaskan jika pembangunan ekonomi melalui distribusi pendapatan, potensi pertumbuhan di masa yang akan datang serta kualitas hidup mendasar bergantung pada sumber daya lingkungannya. Ini menandakan jika pembangunan ekonomi secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungannya sehingga ketika kerusakan lingkungan terjadi, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui 3 indikator kesejahteraan.

### **3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

#### **Latar Belakang Hilirisasi di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral dan tambang. Namun, pengelolaan sumber daya ini belum dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan negara, hal ini disebabkan Indonesia masih mengekspor bijih mineral mentah.

Maka dari itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan hilirisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Hilirisasi industri Minerba ini dilakukan sebagai proses untuk memberikan nilai tambah dari bahan mentah, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan (Ditjen Mineral dan Batu Bara, 2024).

Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban untuk melakukan pengolahan mineral sebelum di ekspor ke luar negeri sesuai dengan Pasal 102 *Undang-Undang No.4 Tahun 2009* tentang Mineral dan Batu Bara yang mewajibkan pemegang IUP atau IUPK meningkatkan nilai tambah mineral dengan membangun fasilitas permurnian, dan Pasal 103 ayat 1 yang mewajibkan pengolahan atau pemurnian mineral hasil penambangan wajib dilakukan di dalam negeri. Peraturan ini kemudian

dilanjutkan dalam Pasal 170 yang mengatur pemegang Kontrak Karya yang sudah beroperasi diwajibkan untuk melakukan pemurnian dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diundangkan, sehingga pada Januari 2014 ekspor mineral dan batu bara sudah dilarang.

Akan tetapi, 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2014 masih banyak perusahaan yang belum siap dalam pembangunan smelter sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 tahun 2014 yang mengatur tentang relaksasi ekspor untuk jangka waktu 3 tahun. Dalam peraturan ini, relaksasi hanya berlaku untuk jenis mineral tembaga, sehingga pada tahun 2017 PP. No1 tahun 2017 yang mengatur relaksasi ekspor bagi semua jenis mineral hingga 5 tahun ke depan.

Di tahun 2018, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.25 tahun 2018 yang mengatur relaksasi ekspor hanya untuk nikel dengan kandungan <1,7% hingga 11 Januari 2022. Lalu, peraturan ini dipercepat dengan Permen ESDM no.11 tahun 2019 yang mengatur jika ekspor nikel dengan kandungan <1,7% hanya diperbolehkan hingga Desember 2019, sehingga pada Januari 2020, ekspor komoditi nikel mentah resmi dilarang (Kementerian ESDM, 2019)

### **Pembangunan Kawasan Industri di Morowali**

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, pemerintah Indonesia mendorong upaya hilirisasi dengan melakukan kerja sama dengan pemerintahan Tiongkok melalui sejumlah perjanjian dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok pada tahun 2013. Kerja sama ini mencakup berbagai sektor termasuk di antaranya pertambangan, energi dan infrastruktur. Sebanyak 21 perjanjian ditandatangani yang menjadi bagian dari komitmen kedua negara untuk meningkatkan investasi dan perdagangan.

Salah satu perjanjian dalam kerja sama ini ialah pembangunan kawasan industri pengolahan nikel yang ada di Kabupaten Morowali. Dipilihnya Kabupaten Morowali ini berdasarkan potensi nikel yang ada di daerah tersebut. Di tahun 2012, total potensi Nikel di Indonesia sendiri sebesar 3.398.269.997 ton dengan potensi terbesarnya yang ada di Pulau Sulawesi dengan cadangan sebesar 10.045.537 ton (International Trade Promotion Centre, 2017). Selain sebagai tempat dengan keberlimpahan sumber daya mineralnya, Kabupaten Morowali dipilih karena di lokasi tersebut sebelumnya telah didirikan 3 unit produksi Nikel Pig Iron (NPI) milik

Tsingshan Group, perusahaan swasta asal Tiongkok yang berfokus pada industri baja dan sekaligus merupakan induk dari perusahaan Shanghai Decent Investment Group.

Kawasan industri yang akan dibangun ini kemudian diberi nama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tepatnya dibangun di wilayah Desa Fatufia dan Desa Labota. Kawasan ini dibangun melalui *Joint Venture* antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok sehingga terbentuk perusahaan baru yaitu PT.IMIP. Perusahaan-perusahaan yang terlibat di antaranya adalah PT. Sulawesi Mining Investment, PT. Bintang Delapan Investama dan Shanghai Decent Investment Group sebagai pemegang saham terbesar dengan total 49,69%. Pembangunan IMIP memakan waktu selama 2 tahun semenjak perjanjian tersebut dilaksanakan pada tahun 2013.

Di wilayah Desa Fatufia terdapat 54 pabrik yang tidak hanya mengolah nikel, tetapi mineral logam lain sebagai industri pendukung seperti *Coal Power Plant*, Mangan, Silikon, *Chrome*, Kokas, Kapur dan lain-lain (PT. IMIP, n.d). Untuk mendukung pengoperasian kawasan ini maka, dibangun beberapa fasilitas pendukung di antaranya adalah fasilitas layanan udara serta pelabuhan dan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di Desa Labota.

Dalam kawasan industri IMIP yang ada di wilayah Desa Fatufia, terdapat 3 klaster utama, yaitu klaster *Stainless Steel*, *Carbon Steel* serta komponen baterai kendaraan listrik. Sampai dengan tahun 2024, PT.IMIP hanya memproduksi nikel kelas II (kadarnya lebih rendah dari 99,8%) yang hasil olahannya adalah *Nickel Pig Iron* (NPI) dan FeroNikel (FeNi).

### **Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel**

#### **Dampak Positif : Perekonomian**

Kebijakan hilirisasi nikel yang telah dilaksanakan ini memperlihatkan dampak positif secara langsung terhadap perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan presentasi distribusi pendapatan yang ada di Kabupaten Morowali ini mempengaruhi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang dimana peningkatan ini terjadi sejak tahun 2016 hingga 2023.

**Tabel 1. PDRB ADHD Kabupaten Morowali 2016-2023**

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Morowali
1	2016	14,533 triliun
2	2017	17,036 triliun
3	2018	37,356 triliun
4	2019	45,349 triliun
5	2020	61, 148 triliun
6	2021	98,917 triliun
7	2022	146, 599 triliun
8	2023	158, 046 triliun

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 2016 dan 2024

Tidak hanya berdampak pada peningkatan PDRB daerah saja, adanya kebijakan hilirisasi melalui pembangunan kawasan IMIP ini juga berdampak positif bagi masyarakat yang ada disekitar kawasan melalui pada peningkatan pendapatan yang dialami oleh Masyarakat.

**Tabel 2. Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali (Ribu Rupiah)
1	2019	375.097
2	2020	385.535
3	2021	601.739
4	2022	876.410
5	2023	927.230

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 2024

Berdasarkan tabel 2, terlihat adanya peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Morowali yang terjadi dalam rentang waktu 5 tahun, di mana di tahun 2019 angka ini sebesar Rp. 375, 097 juta dan meningkat pesat di tahun 2023 dengan angka yang menunjukkan sebesar Rp. 927, 230 juta.

Dampak peningkatan pendapatan ini dirasakan pula oleh masyarakat yang ada di kawasan industri, khususnya di Desa Fatufia dan Desa Labota yang menjadi lokasi berdirinya kawasan industri IMIP melalui peningkatan pendapatan, berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pembangunan infrastruktur.

Di Desa Fatufia terdapat peningkatan pendapatan yang dirasakan masyarakat setelah beralih profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Sebelumnya, pendapatan petani tersebut diangka Rp.600.000 hingga Rp. 2.500.000 per bulan, kemudian angka ini naik setelah menjadi karyawan pabrik IMIP dengan pendapatan sebesar Rp.6.000.000 hingga Rp. 8.500.000 per bulan (Nardia, 2023). Di Desa Labota, adanya industri ini telah meningkatkan aktivitas UMKM dengan tiga jenis usaha terbanyak

---

yang meliputi, kios sembako yang memiliki unit pertamini, stan minuman dan warung makan semi permanen (PT. IMIP, 2025).

Masuknya PT. IMIP juga memberikan dampak positif pada infrastruktur yang ada di Desa Fatufia dan Labota ini melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Program ini dijalankan dengan memberikan bantuan infrastruktur seperti pembangunan kembali fasilitas-fasilitas sekolah, pemberian truk sampah hingga pemberian beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Politeknik Industri Logam Morowali yang terletak di Desa Labota.

Adanya kebijakan hilirisasi dan pembangunan kawasan industri nikel telah memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya pada peningkatan PDRB dan peningkatan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, peningkatan ini tidak semata-mata menjadi tolak ukur dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri harus dilihat melalui aspek sosial yang lebih luas termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di kawasan industri nikel PT. IMIP yaitu Desa Fatufia dan Desa Labota, kesejahteraan ini harus dilihat lebih lanjut melalui 3 faktor kesejahteraan yaitu, peran lembaga pemerintahan, pengaruh norma sosial serta kesehatan dan pendidikan.

### **Desa Fatufia**

Desa Fatufia adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 berpenduduk sebanyak 3.283 orang (Sistem Informasi Desa Fatufia, nd). Pada umumnya, masyarakat Desa Fatufia merupakan komunitas yang terbuka dengan kelompok masyarakat lain yang bermukim di dalamnya (Rukmana, 2016).

Masyarakat Fatufia dalam hal kultural memiliki sikap gotong royong, tolong menolong dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di antaranya kehidupan ekonomi dan mata pencaharian (Rukmana, 2016). Hal ini juga didukung dengan nilai gotong royong yang bersumber dari mata pencaharian masyarakat agraris seperti petani dan nelayan yang sangat erat kaitannya dengan kerja sama dan etos kerja yang berbasis komunal.

Masuknya industri nikel di desa Fatufia berawal dari tambang nikel PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) yang resmi beroperasi sejak tahun 2010. Di tahun yang sama 2010, PT. BDM melakukan kerja sama melalui *join venture* dengan perusahaan China Tsingshan, anak dari perusahaan PT. Dingxin Group. Dalam *join venture* ini PT. BDM

---

memiliki saham sebesar 45% dan Dinxin Group sebesar 55% di bawah perusahaan PT. Sulawesi Mining Investment (Anriani, Lampe dan Halim, 2019). Di tahun 2013 ketiga perusahaan ini kemudian bekerja sama membangun kawasan industri IMIP.

### **1) Peran Lembaga Pemerintah**

Peran pemerintah dalam mengawasi dampak industri dinilai lemah. Sejak 2020, warga Fatufia telah melakukan demonstrasi terkait aktivitas pembongkaran batu bara oleh PT. Bintang Delapan Group yang menimbulkan debu. Hingga 2024, tuntutan masyarakat belum ditindaklanjuti (Bharata, 2024). Demonstrasi ini bahkan berujung pada dua masyarakat dilaporkan ke polisi, yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi, meskipun UU No. 32 Tahun 2009 telah menjamin perlindungan bagi pejuang lingkungan.

### **2) Pengaruh Norma Sosial**

Masuknya industri ke Desa Fatufia mengubah sumber mata pencaharian dari petani dan nelayan menjadi buruh pabrik, serta menggeser norma agraris yang komunal menjadi lebih individualis. Petani yang terbiasa dengan jam kerja fleksibel kini harus menyesuaikan diri dengan disiplin ketat dan sistem shift di pabrik (Dahlan, 2018), sehingga menyebabkan waktu untuk berinteraksi semakin berkurang. Selain itu, sikap individualis ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat juga berubah. Hal ini disebabkan karena akses listrik yang beroperasi 24 jam membuat anak-anak lebih sering menonton TV daripada bermain atau ke masjid.

### **3) Kesehatan dan Pendidikan**

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Fatufia telah menyebabkan gangguan kesehatan dan kerugian finansial yang telah menghambat aktivitas masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan. Aktivitas produksi PT. IMIP melalui asap dan debu akibat bongkar muat batu bara yang terbawa angin ke pemukiman. Tahun 2023, WALHI Sulawesi Tengah mencatat sekitar 52% warga Fatufia terkena ISPA akibat aktivitas PLTU batu bara (WALHI, 2023). Seorang masyarakat menyebut dirinya dan dua anaknya pernah dirawat karena batuk dan sesak napas, bagi anak-anaknya hal ini telah menyebabkan terganggunya proses belajar (Mashur, 2021).

Dampak kesehatan yang muncul akibat kerusakan lingkungan juga menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat. Salah satu, masyarakat mengaku sering flu dan batuk akibat polusi industri, dan harus iuran untuk berobat karena tak ada bantuan dari pemerintah maupun perusahaan (AEER, 2021).

Gangguan finansial ini juga dialami terutama nelayan dan pembudidaya keramba. Limbah PLTU yang mencemari laut menyebabkan ikan mati, sehingga nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya lebih besar, dan pembudidaya merugi hingga Rp70 juta karena ikan dan lobster mati akibat limbah yang mengandung timbal dan meningkatkan suhu air (Hariyadi & Aidil, 2024; Nainggolan, 2024).

### **Desa Labota**

Desa Labota adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Desa ini merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Bahodopi yaitu 162,17 km<sup>2</sup> dengan jumlah masyarakat sebanyak 1.843 jiwa (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, nd). Tidak diketahui sejak kapan industri nikel mulai masuk ke desa ini, akan tetapi sebelum masifnya pengolahan di Desa Labota sebagian besar masyarakat di desa ini adalah petani dengan komoditas seperti Padi, Jagung, dan Ketela Pohon (Aksan dan Faqih, 2024).

Berdasarkan salah satu penuturan masyarakat desa Labota, di tahun 2014 desa ini masih dipenuhi hutan-hutan, namun, seiring berjalannya waktu banyak hutan-hutan di desa ini yang ditebang guna pembangunan perusahaan industri nikel. Setelah itu, pembangunan ini terus berlanjut ke wilayah pesisir untuk membangun reklamasi untuk mengangkut ore nikel, hingga batu bara (Bollo, id, 2024).

Adanya sektor industri ke Desa Fatufia dan Desa Labota telah memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya melalui pengembangan UMKM dan peningkatan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat desa Fatufia tidak sepenuhnya hidup sejahtera berdasarkan tiga faktor kesejahteraan yaitu, peran lembaga pemerintah, pengaruh norma sosial, serta kesehatan dan pendidikan.

#### **1) Peran Lembaga Pemerintah**

Di Desa Labota, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap dampak lingkungan PLTU milik PT IMIP menyebabkan kerugian bagi warga, seperti debu batu bara, pembuangan limbah ke laut, dan suara bising. Akibatnya, terjadi konflik sosial yang memuncak dalam aksi demonstrasi GMDLSL pada Juli 2024, menuntut DLH dan DPRD Morowali agar bertindak tegas terhadap pelanggaran lingkungan oleh PT IMIP (WALHI, 2024).

#### **2) Pengaruh Norma Sosial**

Hilirisasi di Desa Labota mengubah norma sosial yang sebelumnya menjunjung kekeluargaan dan kerja kolektif menjadi individualis dan kompetitif.

Peralihan warga menjadi buruh pabrik menyebabkan menurunnya solidaritas sosial. Bagi yang tak memiliki keterampilan industri, tekanan psikologis dan ekonomi meningkat, yang kemudian memicu tindak kriminal seperti pencurian, perkelahian, narkoba, hingga pembunuhan (Sanjaya et al., 2024).

### **3) Kesehatan dan Pendidikan**

Aktivitas PT IMIP berdampak pada masyarakat Desa Labota, termasuk pembangunan PLTU di dekat permukiman dan sekolah seperti SDN Labota dan MTs Aljariyah. Polusi dari PLTU menyebabkan gangguan pernapasan pada siswa, menurut keterangan guru dan siswa (Hariyadi & Aidil, 2024). Selain itu, kerusakan lingkungan juga telah mencemari sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di Desa Labota. Sungai ini terletak di tengah-tengah permukiman masyarakat yang mana masih digunakan untuk aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, dan mencuci kendaraan. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada sungai ini.

Tidak dapat dipungkiri jika kebijakan hilirisasi nikel serta pembangunan smelter di Kabupaten Morowali telah memberikan dampak perekonomian yang cukup signifikan bagi kedua desa, Fatufia dan Labota. Hal ini terlihat dari meningkatnya perekonomian daerah melalui PDRB dan pendapatan masyarakat. Namun meningkatnya perekonomian karena kebijakan hilirisasi ini telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **Dampak Negatif : Kerusakan lingkungan**

Tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Labota dan desa Fatufia ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebijakan hilirisasi. Kebijakan yang mengharuskan adanya fasilitas pengolahan telah mendorong adanya pembukaan industri besar-besaran yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan melalui polusi udara dan pencemaran limbah.

Tim dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako melakukan penelitian di 3 desa di Kecamatan Bahodopi yang termasuk di antaranya adalah Desa Fatufia dan Desa Labota. Hasil dari penelitian ini menunjukkan buruknya kualitas udara di 2 desa tersebut akibat aktivitas industri nikel dengan ditemukannya kandungan polutan PM<sup>10</sup> dan PM<sup>2,5</sup>. Adanya temuan ini telah menyebabkan kerugian bagi kesehatan masyarakat dengan

gejala batuk, pilek, sakit kepala, sesak napas, sakit tenggorokan hingga iritasi mata dan kulit (Sanjaya, *et. al.*, 2024).

**Tabel 3. Konsentrasi PM10 dan PM2,5 di Desa Fatufia dan Desa Labota**

Desa	PM <sup>10</sup> (µg/m <sup>3</sup> )	PM <sup>2,5</sup> (µg/m <sup>3</sup> )
Fatufia	49	46,11
Labota	27,2	<b>91,5</b>

Sumber : Tuk Indonesia (2023), AEER (2023) & Sanjaya *et. al.*, (2024)

Tidak hanya berdampak pada kualitas udara, hadirnya kawasan industri nikel ini juga berdampak buruk pada kualitas air laut melalui pembuangan limbah tailing yang dapat merusak ekosistem sebab sulit terurai dan akan terus terakumulasi dalam rantai makanan melalui proses biomagnifikasi (Syarifuddin, 2022).

Selain limbah tailing, pembuangan limbah PLTU juga berkontribusi pada kerusakan ekosistem laut. Pembuangan air hasil pendinginan PLTU membuat suhu air mengalami kenaikan hingga 39 derajat celcius sehingga mengakibatkan aktivitas nelayan dan keramba jaring para masyarakat terganggu (WALHI Sulawesi Tengah, 2023).

Meskipun PT. IMIP telah mendapat izin untuk membuang limbah ke laut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 259/208 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut, akan tetapi dampak buruk dari limbah tersebut tidak dapat dihindari. Hal ini terlihat dari ditemukannya kadar Kromium Heksavalen atau Cr6+ di delapan titik yang tersebar di wilayah perairan di sekitar kawasan IMIP (AEER, 2024).

Kromium Heksavalen atau Kromium-6 adalah senyawa kromium yang muncul dari hasil produksi industri. Paparan senyawa ini dapat melalui sistem pernapasan dan kontak langsung dengan kulit. Dampak yang biasanya ditemui adalah iritasi faring, asma, bronkititis, *bronchospasms* hingga edema dengan gejala yang paling umum terjadi adalah batuk, sesak napas, alergi, mimisan hingga ruam kulit (WALHI, Sulawesi Tengah, 2024). Selain mencemari laut, adanya aktivitas industri nikel ini juga mempengaruhi sungai-sungai yang terletak di kawasan industri IMIP seperti sungai yang ada di Desa Labota dan Fatufia. Dari sungai yang ada di kedua desa ini ditemukan hasil kromium heksavalen dengan kandungan (0,075 mg/L) (WALHI, Sulawesi Tengah, 2024).

Adanya pencemaran sungai ini membuat aktivitas masyarakat sekitar terganggu. Sumur galian dan sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kini telah kering dan berubah warna menjadi hitam dan kecokelatan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak berani lagi menggunakan air sumur dan air sungai karena dapat mengakibatkan gatal-gatal dan iritasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah pada kenyataannya memberikan dampak positif dan negatif yang berimplikasi pada berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Dampak positif tersebut adalah dampak ekonomi yang terlihat dengan kenaikan PDRB daerah Morowali dan pendapatan per kapita yang juga meningkat. Akan tetapi, pembangunan ekonomi tidak semata-mata dilihat berdasarkan peningkatan angka-angka tersebut, tetapi juga meliputi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pengurangan kemiskinan dan perluasan pilihan hidup, yang mana hal-hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungannya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitaran kawasan IMIP menyebabkan masyarakat desa Fatufia dan Labota belum dapat hidup dalam kesejahteraan. Hal ini dikarenakan masuknya kawasan industri ini telah mengakibatkan pencemaran yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Hal ini harus diperparah dengan minimnya peran lembaga pemerintahan dalam melakukan pengawasan pada aktivitas industri.

Walaupun kehadiran industri nikel memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali, khususnya di Desa Fatufia dan Desa Labota, akan tetapi masyarakat harus menanggung konsekuensi yang jauh lebih besar dalam bentuk kerusakan lingkungan yang signifikan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memengaruhi secara langsung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dampaknya terlihat melalui terganggunya kesehatan warga akibat polusi, menurunnya akses dan kenyamanan dalam pendidikan karena lokasi sekolah yang terdampak, serta hilangnya mata pencaharian tradisional seperti bertani dan nelayan akibat rusaknya sumber daya alam.

---

**REFERENSI**

- Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, (2022), "Kebijakan, Risiko, dan Pencegahan Dampak Pertambangan Nikel Pada Laut di Indonesia", <https://share.google/GAMpyp7pviRJmAG9a>
- Anriani, B, H., Lampe, I., Halim, H., (2019) "Fatufia : Potret Sebuah Desa Tambang. [https://www.researchgate.net/profile/Haslinda-Anriani/publication/340806994\\_FATUFIA\\_Potret\\_Sebuah\\_Desha\\_Tambang/links/5e9e7eac299bf13079ada1c2/FATUFIA-Potret-Sebuah-Desa-Tambang.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Haslinda-Anriani/publication/340806994_FATUFIA_Potret_Sebuah_Desha_Tambang/links/5e9e7eac299bf13079ada1c2/FATUFIA-Potret-Sebuah-Desa-Tambang.pdf)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, (2021), "Produk Domestik Bruto Kabupaten Morowali 2016-2020", <https://share.google/ED96VUzhkXGUPzf39>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, (2021), "Produk Domestik Bruto Kabupaten Morowali 2019-2023", <https://share.google/ED96VUzhkXGUPzf39>
- Aksan dan Faqih. (2023), "Keadaan Petani di Morowali Sebelum Masifnya Industri Tambang (Part II)", <https://kamputo.com/kesenjangan-petani-di-morowali-sudah-terjadi-sebelum-masifnya-industri-tambang/>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, (n,d), <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17829/lobota>
- Bharata, S, A. (2024), "Warga Tuntut Ganti Rugi Dampak Debu Aktivitas Industri PT.IMIP, <https://share.google/htuQQ80Wrs8JmUrFs>
- Bollo.id,(2024), "Warga Labota Keluhkan Debu Batu Bara" <https://share.google/hsz2jzcl3qxTCpKjx>
- Dahlan., H., (2018). Enviromental and Social Change in Community Around Nickel Mine : A Case Study in PT. BDM Nickel Mine, Fatufia, Morowali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 9 (81). <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018>
- Hariyadi, D., dan Aidil, M., (2024). "Masalah Kesehatan Ancam Siswa di Sekitar PLTU Morowali", <https://www.bollo.id/berita-terbaru/masalah-kesehatan-ancam-siswa-di-sekitar-pltu-morowali/>
- International Trade Center Osaka, "Market Brief 2017", <https://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2017/06/Market-Brief-ITPC-Osaka-2017-HS-7501-Nickel.pdf>
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, (2019). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Mashur, S. (2021), "Fatufia Dalam Kepungan Batu Bara", <https://share.google/OYBMYt7koOJI2N0XM>

- Nainggolan, Kartini, (2024), "PSN Industri Nikel Hilangkan Ruang Hidup dan Budaya Warga Bahodopi", <https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun/psn-industri-nikel-hilangkan-ruang-hidup-dan-budaya-warga-bahodopi/>
- Oktarinda, A. (2013), Ini 21 Perjanjian Kerja Sama Indonesia-China, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20131003/9/166900/ini-21-perjanjian-kerja-sama-indonesia-china>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4.*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 *Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, (2018).* Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- PT. IMIP. (2025), "UMKM Bahodopi Tumbuh 62, 7 Persen, Serap 16.705 Pekerja", <https://imip.co.id/umkm-bahodopi-tumbuh-627-persen-serap-16-705-pekerja/>
- PT. IMIP. (n.d.) Awal Mula Berdirinya Kawasan PT IMIP, <https://imip.co.id/faq/#hfaq-post-8668>
- Responsible Mining Indonesia. (n,d) "Indonesia Morowali Industrial Park", <https://share.google/2mxgA3ZAuFZd4x2s7>
- Rukmana., S., (2016). Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan Permukiman Masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. <https://share.google/i2IkqDlaAe30OmPMj>
- Sanjaya, et, al., (2024) "Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan PM10, PM2,5 dan SO2 Pada Masyarakat Desa Fatufia, Bahomakmur dan Labota" <https://share.google/ixH4J357mSMVssKuW>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sistem Informasi Desa Fatufia. (n,d) "Desa Fatufia", <https://share.google/mVtbBUaWPtGqNjU27>
- Syarifuddin., N., (2022). Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali. *Jurnal Riset & Teknologi Kemaritiman*, 1 (2).

Syahrir, I., (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral : Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 1 (1). <https://doi.org/10.31685/wxma2f34>

Todaro, P., Michael dan Smith, C., Stephen (2014). *Economic Development (12<sup>th</sup> ed)* : Pearson.

WALHI Sulawesi Tengah, (2024), "WALHI Sulteng Mendukung Kasi Masyarakat Desa Labota yang Tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (GMDLSL)", <https://www.walhi.or.id/walhi-sulteng-mendukung-aksi-masyarakat-desa-labota-yang-tergabung-dalam-aliansi-gerakan-masyarakat-sadar-lingkungan-gmdsls>

WALHI Sulawesi Tengah, (2023), "Sungai Sekitar Tambang dan Industri Nikel di Morowali Terpapar Kandungan Logam", <https://walhisulteng.org/sungai-sekitar-tambang-dan-industri-nikel-di-morowali-terpapar-kandungan-logam/>

WALHI Sulawesi Tengah, (2023) "Catatan Akhir Tahun 2023" <https://share.google/dWVJc1IU2wSevJwF7>